



PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2026

MAHKAMAH AGUNG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2026
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia


Sugiyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

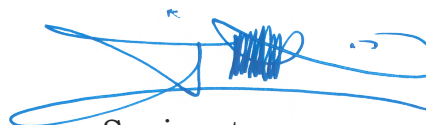
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96.46%
		2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100.00%
		3.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.97%
		4.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91.01%
		5.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90.69%
		6.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11%
		7.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara	39.55%
		8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10.48%
		9.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18.69%
		10.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97.00%
		11.	Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95.76%
		12.	Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89.80%
		13.	Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang	89.93%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
			diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98.00%
		2.	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70.00%
		3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85.00%
		4.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.78
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73
		2.	Nilai Kinerja Anggaran	90
		3.	Nilai Sistem Merit	203
		4.	Indeks Pengelolaan Aset	3.75
		5.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94
		6.	Predikat opini Laporan Keuangan	WTP

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

	Program		Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp	198.625.196.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	14.555.126.944.000
Total Anggaran		Rp	14.753.752.140.000

Jakarta, 2 Januari 2026
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia


Sugiyanto